

KR, 4/7/03

KANGKUNG

Sofian Effendi¹

Setiap orang yang pernah berkunjung ke pulau Lombok, tentu telah merasakan betapa nikmatnya makan makanan khas warga setempat, ayam taliwang disertai plecing kangkung. Ala maak lezatnya ... kata kawan saya novelis kondang di kampus biru.

Dalam Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VI DPR dengan para rektor PT-BHMN hari Rabu, 25 Juni, sayuran lokal yang kondang ini muncul kepermukaan. Para pembaca jangan salah duga, pada siang itu tidak dihidangkan sayur kangkung dan ayam laiwang sebagai hidangan siang. Kangkung, khususnya petani kangkung yang berhasil, digunakan sebagai tamsil oleh wakil rakyat yang dari fraksi baju kuning, bagaimana kiat yang dapat ditempuh oleh para rektor PT-BHMN untuk menutupi defisit anggaran masing-masing, yang besarnya mencapai Rp. 200 sampai 300 milyar per tahun.

Bapak wakil rakyat tadi bercerita pengalaman hidup beliau ketika baru pindah ke Jakarta berpuluh-puluh tahun yang lalu. Pertama kali ke Jakarta beliau tinggal di kawasan Rawamangun yang pada waktu itu masih daerah rawa-rawa. Salah seorang tetangganya adalah migran dari Jawa yang memulai perjuangan hidupnya di ibukota, bertani kangkung. Bayangkan, kalau setiap rumah tangga di Jakarta yang berpenduduk 6-7 juta kala itu makan dua ikat kangkung sehari. Diperlukan minimal 3 sampai 4 juta ikat kangkung setiap hari.

Nggak sampai setahun bertani kangkung, migran asal Jawa tadi telah berhasil membangun rumah semi permanen. Dan sejak itu kesuksesannya melejit, mungkin seiring dengan bertambahnya konsumen kangkung di Jakarta. Mengambil tamsil dari petani kangkung ini, wakil rakyat dari konstituen baju kuning menyarankan agar pimpinan 4 PT-BH berusaha noboki kekurangan biaya dengan mengembangkan kegiatan usaha, tanpa membebankan biaya tinggi kepada masyarakat.

Selama hampir lima jam para pimpinan PT-BHMN harus duduk menghadapi wejangan dari lebih kurang 15 wakil rakyat dalam pertemuan kemarin. Bermacam-macam kiat menambal defisit anggaran PT disampaikan, mulai dari mengembangkan unit agrobisnis, mengkomersialkan hasil penelitian, sampai ke pengalihan anggaran diklat kedinasan ke anggaran bidang pendidikan.

Menurut perkiraan Dirjen Dikti, untuk melaksanakan pendidikan tinggi bermutu dan berkeadilan diperlukan biaya sebesar Rp. 18 juta per mahasiswa per tahun. Saat ini Pemerintah baru mampu menyediakan sekitar Rp. 6 juta per mahasiswa per tahun. Jadi ada kebutuhan tambahan biaya sebesar Rp. 12 juta per mahasiwa per tahun. biaya untuk melaksanakan pendidikan tinggi bermutu dan berkeadilan? Pada saat ini di Indonesia ada 3,8 juta mahasiswa yang sedang menuntut pendidikan di perguruan

¹ Penulis adalah Guru Besar kebijakan Publik dan Rektor UGM

tinggi umum dan perguruan tinggi kedinasan. Diperlukan tambahan biaya sebesar Rp. 4,6 trilyun untuk menjaga agar kualitas akademik tidak merosot dan keadilan akses pendidikan tinggi tidak bertambah jelek. Namun siapa dan dari mana biaya tersebut dapat kita harapkan?

Dengar Pendapat Umum antara Komisi VI dengan Dirjen Dikti dan Rektor PT-BHMN kemarin belum sampai pada solusi konkrit. Terasa sekali ada jurang yang amat lebar antara kubu legislatif dan kubu pemerintah dalam mencari solusi pembiayaan PT. Pemerintah menganggap pola pembiayaan yang lebih rasional melalui subsidi silang seperti yang ditempuh PT-BHMN adalah strategi yang lebih rasional dan edukatif. Sebaliknya, kubu legislatif mengaggap pendidikan tinggi yang disubsidi besar oleh pemerintah adalah solusi yang paling sesuai dengan tuntutan masyarakat. Saya akhirnya teringat pada jadwal politik kita. Kan setahun lagi Pemilu anggota legislatif akan diadakan. Jangan-jangan tawaran "*quality and cheap education for all*" hanya sekedar kiat untuk menarik simpati rakyat pada partai dan calon tertentu? Benarkah? Wallahualam bissawab.

Yogyakarta, 26 Juni 2003